

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh berbagai factor, salah satu diantaranya yang paling penting dan menentukan adalah guru. Sayangnya, berbagai hasil study menunjukkan bahwa kompetensi guru belum seperti yang diharapkan. Dalam peraturan menteri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dinyatakan bahwa setiap guru harus memiliki 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.¹

Pengembangan sumber daya manusia pendidik, khususnya pengembangan kompetensi pedagogik dan profesional guru, merupakan usaha mempersiapkan guru agar memiliki berbagai wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai petugas profesional. Pengembangan atau peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional harus bertolak pada kebutuhan atau permasalahan nyata yang dihadapi oleh guru, agar bermakna.²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 ayat (b) mengamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

¹ Y. Suryana dan I. Wayan, *Kompetensi Pedagogik, Untuk Meningkatkan Kinerja dan Mutu Guru*, (Jakarta: CV.Azzahra, 2015), h. iii

² *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*, (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), h. 1

Pernyataan undang-undang di atas pada intinya mempersyaratkan guru untuk memiliki: (i) kualifikasi akademik minimum S1 atau D-IV; (ii) kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional; dan (iii) sertifikat pendidik.

Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya secara berkelanjutan melalui pelatihan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Kegiatan tersebut sangat dimungkinkan dilaksanakan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), mengingat wadah ini dijadikan sebagai tempat melakukan pertemuan bagi guru kelas atau guru mata pelajaran sejenis.

Berkaitan dengan peran forum pertemuan guru di MGMP yang sangat strategis untuk peningkatan kompetensi guru dan kinerja guru, maka pemberdayaan MGMP merupakan hal mendesak yang harus segera dilakukan. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru, antara lain melalui berbagai pelatihan instruktur, peningkatan sarana dan prasarana, dan peningkatan mutu manajemen MGMP. Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan MGMP menyebutkan, masih banyak MGMP yang belum menunjukkan peningkatan kinerja yang berarti. Di beberapa daerah peningkatan kinerja MGMP cukup menggembirakan, namun di sebagian besar daerah lainnya masih memprihatinkan.³

Berkenaan dengan hal tersebut Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik mengembangkan panduan penyelenggaraan KKG atau MGMP sebagai berikut: (1) *Rambu-rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP*, (2) *Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan KKG dan MGMP*, dan (3) *Prosedur Operasional Standar Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di KKG dan MGMP*. Diharapkan panduan ini dijadikan pegangan bagi KKG atau MGMP agar

³ *Rambu-Rambu Pengembangan Kegiatan KKG dan MGMP...h. 2*

aktivitas yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dapat dijadikan wahana bagi pengembangan profesionalisme guru yang bermutu, mandiri, dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 60 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Pasal 47B menyatakan bahwa guru MTs/SMP/MA/MAK dapat membentuk forum MGMP, forum ini MGMP dapat dibentuk pada tingkat Satuan Pendidikan, Kecamatan dan Kabupaten/Kota.

Eksistensi MGMP saat ini semakin mendapat dukungan dan dorongan dari pemerintah, dengan munculnya kebijakan bahwa semua guru harus mengikuti komunitas MGMP, sebagai prasarat untuk mengakses data GTK, dan mengetahui nilai keprofesiannya saat mengikuti kegiatan guru pembelajar online (GPO), jika semua sudah sesuai maka bisa diterbitkan SKTP sebagai syarat pencairan tunjangan profesi guru. Munculnya kebijakan ini, memberikan signal bahwa guru dengan komunitasnya semakin diakui dan dituntut untuk lebih meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, dengan demikian maka tunjangan profesinya akan dibayarkan.

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.⁴

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan

⁴E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 5

memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.

Lahirnya kurikulum 2013, sebagaimana termuat dalam permendikbud nomor 81A tahun 2013, tentang implementasi kurikulum 2013, dimana proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian autentik, menuntut guru untuk meningkatkan kompetensinya baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, sehingga diharapkan akan berimbas kepada mutu pembelajaran dan hasil belajar serta prestasi belajar sesuai yang diharapkan.

Demikian juga dengan adanya wacana *full day school* yang digulirkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy yang telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias *full day school*. Kebijakan ini berlaku mulai tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2017. Namun bagi sekolah yang belum memiliki sumber daya dan sarana transportasi yang memadai, maka kebijakan ini dilakukan secara bertahap.

Di kabupaten pandeglang yang sudah mulai menerapkan peraturan ini, hanya beberapa sekolah saja sebagai percontohan, itupun hanya pada jenjang SMA. Sementara untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama belum ada yang menerapkannya.

Problem rendahnya mutu dan profesionalitas guru di Indonesia sudah dirasakan sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional. Fenomena yang seperti inilah yang mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan kualitas pendidikan di negara maju, atau bahkan masih lebih rendah dari pada pendidikan di negara-negara di wilayah Asia lainnya.⁵

⁵Sulistiyo, *Seminar Sertifikasi Guru Antara Profesionalisme dan Komersialisme*, (Semarang: Seminar Regional Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo, 2007).

Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dalam menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.

Profesional harus dipandang sebagai sumber proses yang terus menerus. Dalam proses ini, Pendidikan pra jabatan (Pre-Service Education) pendidikan dalam jabatan termasuk penataran (In Service Training), pembinaan dari organisasi Profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, Penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, besar kecilnya gaji/imbalan, dan lain-lain secara bersama-sama menentukan profesionalisme guru.⁶

Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi guru tersebut adalah dengan meningkatkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi secara relevan dan linier, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, Pasal 1, yang selama ini masih banyak guru yang belum linier, guru PAI mengajar matematika, seni budaya, dan lain-lain, mengikuti diklat fungsional, aktif mengikuti berbagai kegiatan di KKG/MGMP, mengikuti seminar pendidikan, dan giat membaca buku-buku profesional.

Sungguh tidak ada alasan bagi guru untuk berkeberatan atau malas melakukan upaya-upaya tersebut karena guru saat ini pada umumnya telah bersertifikasi sebagai tenaga pendidik profesional yang telah mendapatkan tunjangan profesi satu kali gaji pokok setiap bulannya. Kondisi guru yang sudah demikian harus menjadi motivasi,

⁶Dedi Supriyadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru*, (Yogyakarta : Adi Cipta Karya Nusa, 1999), Cet.II, hlm. 180.

stimulasi, dan kesadaran mendalam bagi setiap guru untuk proaktif berupaya meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara serius demi kemajuan pendidikan nasional.⁷

Sistem pembinaan profesional dilakukan melalui gugus-gugus, KKG (Kelompok Kerja Guru), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan sejenisnya, sistem ini telah dikembangkan mulai tingkat SD hingga SMA. Ini merupakan langkah inovatif dalam membina kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru dan sebagai upaya untuk mengkompensasi kekurangan pada dua cara diatas (pendidikan dalam jabatan dan pelatihan dalam jabatan). Studi yang pernah dilakukan mengungkapkan bahwa pelatihan dalam pra jabatan mampu meningkatkan kemampuan para guru, tetapi itu saja tidak cukup. Karena perlu ada sarana yang memungkinkan terjadinya kolaborasi antara para guru untuk berbagi pengalaman.⁸

MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesional guru mata pelajaran sejenis di tingkat sanggar ataupun di tiap-tiap sekolah yang terdiri dari dua unsur pokok yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Musyawarah yang dimaksud di sini adalah mencerminkan kegiatan dari, oleh dan untuk guru. Adapun guru mata pelajaran adalah guru SMP atau SMA Negeri atau Swasta yang mengasuh dan bertanggungjawab untuk mengelola mata pelajaran tertentu yang ditetapkan dalam kurikulum.

Dengan demikian, kehadiran MGMP sebagai wadah kegiatan profesional guru diharapkan dapat menyamakan visi dan persepsi dalam menentukan sikap dan tindakan terhadap aneka masalah tersebut sehingga dapat diambil solusi yang tepat, efektif dan efisien.

⁷ Y. Suryana, *Kompetensi Pedagogik, Untuk Meningkatkan, ...* hlm . 3

⁸ Dedi Supriyadi, *Mengangkat Citra Dan Martabat Guru...* hlm. 180.

Lebih dari itu, melalui MGMP guru dapat meningkatkan kemampuan teknis dalam mengelola mata pelajaran yang menjadi tanggungjawabnya, terampil dan bijaksana dalam mengadaptasi setiap dinamika perubahan masyarakat atau perubahan kebijakan pendidikan sehingga benar-benar menjadi guru yang profesional.

Pada pokoknya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru berdampak pada kualitas pendidikan, dan banyak cara atau alternatifnya untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru, yaitu salah satunya melalui sistem pembinaan profesionalisme seperti KKG (kelompok kerja guru) untuk SD dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) untuk SMP, SMA/SMK

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis ingin meneliti tentang *Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di MGMP PAI SMP Rayon 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang)*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai bahan pokok pertimbangan dalam menentukan batasan masalah dan rumusan masalah penelitian. Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) merupakan forum komunikasi antar sesama guru mata pelajaran, untuk membahas dan mendiskusikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah, dan mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran baik berupa kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pihak terkait, sehingga program dan kegiatannya dapat dilaksanakan secara optimal.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan MGMP PAI SMP khususnya di rayon 1 Kabupaten Pandeglang, masih terkendala dengan minimnya pembiayaan, pengaturan waktu yang harus menyesuaikan dengan kegiatan guru, dan kesibukan guru terutama yang mempunyai tugas tambahan di sekolah.
3. Kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang dimiliki guru mata pelajaran saat ini cenderung mengalami penurunan, khususnya di kabupaten Pandeglang, bila dibandingkan dengan daerah lain, seperti Serang, Cilegon dan Tangerang. Apalagi bila dibandingkan dengan Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dll. Padahal pemerintah sudah berupaya menambah anggaran pendidikan. Pemberian tunjangan profesi guru sepertinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dan peningkatan kompetensi guru.
4. Hendaknya setiap individu harus memiliki landasan dan kemampuan yang meliputi perilaku kerja keras, disiplin, tanggung jawab yang dapat dipercaya dan sejenisnya dengan berpedoman pada ajaran al-Qur'an dan al-Hadis.⁹

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan tentang Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus di MGMP PAI SMP Rayon 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang), maka untuk mempermudah penelitian ini, penulis membatasi masalah dalam sebagai berikut :

1. Kegiatan Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada MGMP PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang.
2. Kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang

⁹Komaruddin Hidayat, *Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial*, (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 114

3. Peran Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dalam Meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang.

Batasan-batasan masalah inilah yang ingin diketahui oleh peneliti, agar dalam penelitian ini dapat terarah dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian.

D. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian dan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini difokuskan dalam tiga topik permasalahan, yang dapat diasumsikan sebagai problem akademik dan kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang?
3. Bagaimanakah Peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan MGMP PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang
3. Untuk mengetahui peran MGMP terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional bagi guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai pada penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui pelaksanaan MGMP PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang
2. Dapat mengetahui kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang
3. Dapat mengetahui peran MGMP terhadap peningkatan kompetensi Pedagogik dan profesional bagi guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang.
4. Memberikan informasi dan dijadikan rujukan yang berguna bagi para praktisi pendidikan terutama guru-guru Pendidikan Agama Islam yang tergabung dalam MGMP Pendidikan Agama Islam SMP sehingga di harapkan guru-guru Pendidikan Agama Islam tersebut lebih profesional dalam pekerjaannya.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam persyaratan bahwa penelitian ini berbeda dengan sebelumnya, penelusuran kepustakaan dan karya hasil penelitian terdahulu, kiranya masih sedikit buah karya penelitian yang mengkaji tentang MGMP, lebih khusus lagi dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional.

Penelitian dalam tesis: “Efektifitas Program MGMP IPS Tingkat SLTP Kabupaten Kotabaru Yogyakarta.”¹⁰ Persamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang MGMP, sedangkan perbedaannya yaitu Penelitian pada tesis ini difokuskan pada kajian manajemen sumber daya manusia (SDM) ditinjau dari fungsi, menganalisis tentang efektifitas program pelatihan MGMP IPS dalam membekali para guru IPS tingkat SLTP di Kabupaten Kotabaru. Dengan temuan tesis kuantitatif bahwa: program pelatihan MGMP mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterampilan guru dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sedangkan pada tesis yang akan penulis teliti lebih mengarah kepada peningkatan kompetensi pedagogik dan

¹⁰Basri, Hasanul, “*Efektifitas Program MGMP IPS Tingkat SLTP Kabupaten Kotabaru,*” (Tesis, Yogyakarta: UNY, 2003)

profesional guru dan peran MGMP PAI SMP Kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru.

Penelitian dalam tesis, “Pembinaan Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP di Rayon 3 Pandeglang.”¹¹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang MGMP, sedangkan perbedaannya yaitu pada tesis ini membahas dan meneliti tentang pembinaan guru dari aspek kompetensi pedagogik dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sedangkan tesis yang akan penulis teliti adalah bagaimana peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru melalui peran MGMP PAI SMP Rayon 1 Kabupaten Pandeglang.

Penelitian dalam tesis, dengan judul “Aktivitas Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin”.¹² Persamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang MGMP dalam meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tesis ini rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aktivitas Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin dan faktor- factor apa saja yang mempengaruhinya dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Subjek Penelitian ini adalah Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) yang mengikuti Kelompok Kerja Guru Tahun Ajaran 2006/2007 yang berjumlah 15 orang, sedangkan objek 22 penelitian ini adalah Aktivitas Kelompok Kerja Guru PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri. Untuk mengumpulkan

¹¹Roudoh, “Pembinaan Guru Melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SMP di Rayon 3 Pandeglang (Tesis: Pascasarjana IAIN SMHB Serang, 2014)

¹²Ulfah, “Aktivitas Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) dalam meningkatkan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin” (Tesis: Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007, <http://www.anypdftools.com/buy/buy-pdf-to-word.html>)

data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi, angket, wawancara, dan documenter. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah editing, koding, tabulating dan interpretasi data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya dari jawaban responden, dari hasil nilai mengenai aktivitas Kelompok Kerja Guru PAI dalam meningkatkan profesionalisme guru sekolah Dasar Negeri dan ditunjang oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya juga memiliki nilai tinggi. Ini berjalan aktif dan sudah sesuai dengan dengan program Kelompok Kerja Guru PAI untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Sedangkan tesis yang akan penulis teliti lebih kepada penelitian tentang peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, sehingga diharapkan dapat berimbas kepada peningkatan mutu pembelajaran.

Penelitian dalam tesis dengan judul, “Eksistensi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam Pada SMA Di Kota Banjarmasin (Analisis SWOT Dalam Konteks Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam)”¹³ Persamaannya yaitu sama-sama membahas dan meneliti tentang eksistensi MGMP dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama islam (PAI). Sedangkan perbedaannya adalah pada tesis ini membahas tentang Eksistensi MGMP PAI Pada SMA Kota Banjarmasin dalam konteks pengembangan kompetensi Guru PAI (Analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan); fungsi dan tujuan, tugas dan tanggung jawab, bentuk kegiatan, serta perangkat organisasi MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin. Adapun jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah diskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini para Guru PAI, Pengurus dan anggota MGMP PAI SMA Kota Banjarmasinserta beberapa pejabat yang terkait dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Sumber dan alat pengumpul data

¹³Bahrundy DP, “Eksistensi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam Pada SMA Di Kota Banjarmasin (Analisis SWOT Dalam Konteks Pengembangan Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam)”. (Tesis: Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2010)

meliputi; responden (GPAI), informan (pihak terkait), dan dokumen MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin. Alat pengumpul data adalah angket, wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yaitu, penentuan katagorisasi bobot persentasedari frekuensi responden, ditindaklanjuti analisis, SWOT factor internal MGMP itu sendiri. Hasil penelitian menggambarkan bahwa, secara persentasi komulatif dari 87 item kegiatan, hanya 21 item (24,13%) kegiatan yang berjalan, dan 66 item (75,87%) kegiatan yang belum dilaksanakan, ini tentu berdampak pada pengembangan kompetensi GPAI SMA di Kota Banjarmasin itu sendiri. Kekuatannya meliputi kuantitas dan kualitas GPAI, wilayah kerja, sarana transportasi, informasi dan komunikasi, semangat ukhuwah, jenis kegiatan yang dimiliki GPAI/MGMP PAI SMA Kota Banjarmasin. Kelemahannya dalam hal; kurang lengkapnya perangkat organisasi dan kurang optimalnya fungsi MGMP tersebut, lemahnya kompetensi pengurus, kurang proaktifnya mengakses komunikasi dan informasi secara eksternal, tidak efektifnya pengelolaan waktu, tidak meratanya pembinaan karier GPAI/anggota MGMP, tidak adanya sarana, fasilitas serta anggaran khusus untuk peningkatan kegiatan MGMP PAI SMA di Kota Banjarmasin tersebut.

Sedangkan tesis yang akan penulis teliti lebih kepada penelitian tentang peran MGMP dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru, sehingga diharapkan dapat berimbas kepada peningkatan mutu pembelajaran dan peningkatan hasil belajar siswa.

Penelitian dalam tesis dengan judul tesis; “Implementasi Lesson Study Berbasis MGMP PAI Oleh Guru SMPN di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan”.¹⁴ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang implementasi dan aktivitas MGMP, sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi Lesson Study berbasis MGMP PAI dalam mengatasi kesulitan siswa SMPN di Kabupaten Balangan, yaitu diagnose kejenuhan dan ketidakpahaman siswa terhadap

¹⁴Hajimah, “*Implementasi Lesson Study Berbasis MGMP PAI Oleh Guru SMPN di Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan*” (Tesis: IAIN Antasari Banjarmasin, 2012)

pelajaran. Dan untuk mengetahui implementasi Lesson Study berbasis MGMP PAI oleh guru SMPN di Kabupaten Balangan, yang terdiri dari plan, do dan see. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi, yang digali dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan implementasi Lesson Study berbasis MGMP PAI dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu diagnose kejenuhan dan ketidak pahaman siswa terhadap pelajaran. Dan data implementasi Lesson Study berbasis MGMP PAI oleh guru SMPN di Kabupaten Balangan yang terdiri dari plan, do dan see. Subjek penelitian adalah guru PAI yang tergabung dalam MGMP PAI SMPN Kabupaten Balangan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data dan display data untuk selanjutnya dilakukan analisis data.

Penemuan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Lesson Study berbasis MGMP PAI dalam mendiagnosa kesulitan belajar siswa berjalan sebagaimana mestinya, plan dibahas bersama-sama, do berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan, kendala yang ditemukan antara lain; (a) penggunaan waktu yang kurang efektif dan efisien (b) guru kurang menguasai dan kurang terampil menggunakan model pembelajaran yang bervariasi (c) guru kurang mampu menggunakan ICT (d) media pembelajaran masih kurang (e) sarana dan prasarana belum memadai. Pada tahap see ditemukan bahwa, ketidakpahaman siswa terhadap pelajaran berawal dari kejenuhan, sehingga mereka tidak memperhatikan pembelajaran, rendahnya nilai post test, tidakberani menyampaikan pertanyaan dan tidak mampu menjawab pertanyaan secara lisan. Sedangkan pada tesis yang akan penulis teliti yaitu tentang kegiatan MGMP PAI SMP Rayon 1 Pandeglang dan peranannya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 1 Pandeglang.

Renny Sofiraeni, Disertasi dengan judul “Model Pengembangan Profesional Berkelanjutan Guru IPA Melalui Lesson Study Berbasis MGMP”. Persamaan dengan tesis

yang akan disusun peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan MGMP dalam hubungannya dengan profesionalisme guru, sedangkan perbedaannya yaitu pada disertasi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MGMP Gugus dan pembelajaran di sekolah peserta MGMP. Penelitian ini mengangkat masalah tentang profesionalitas guru IPA di SMP yang berkaitan dengan kompetensi yang berhubungan langsung dengan tugas keseharian guru. Sedangkan tesis yang penulis teliti adalah berkenaan dengan bagaimana peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru melalui peran MGMP PAI SMP Rayon 1 Kabupaten Pandeglang.

Ibrohim, disertasi dengan judul “Pengaruh Model Implementasi Lesson Study dalam Kegiatan MGMP terhadap Peningkatan Kompetensi Guru dan Hasil Belajar Biologi Siswa”. Persamaan dengan tesis yang akan disusun peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan MGMP dalam hubungannya dengan kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya adalah pada disertasi ini kesimpulan dari penelitian adalah: (1) Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam MGMP Sains di Kabupaten Pasuruan sebelum implementasi *lesson study* telah sesuai dengan tujuan dan fungsi MGMP namun pola pelaksanaan belum konsisten dan keefektifannya dalam meningkatkan kemampuan masih rendah. 2) Model implementasi *lesson study* dalam kegiatan MGMP Sains-biologi SMP di Kabupaten Pasuruan berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan pemahaman teknik edukatif guru, kemampuan mengajar, persepsi dan sikap guru terhadap MGMP, serta peningkatan hasil belajar biologi siswa, namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan penguasaan konsep biologi guru, motivasi berprestasi guru, serta minat, sikap dan motivasi belajar siswa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat direkomendasikan agar dalam upaya meningkatkan kemampuan guru berbasis MGMP memilih model implementasi *lesson study* yang dipadu dengan portofolio. Penyusunan portofolio setelah melaksanakan *lesson study* dapat meningkatkan kemampuan merefleksi, mengembangkan metakognisi dan

mendorong guru belajar secara mandiri untuk memecahkan masalahnya. Sedangkan pada tesis yang akan penulis teliti yaitu tentang kegiatan MGMP PAI SMP Rayon 1 Pandeglang dan peranannya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 1 Pandeglang.

Penelitian dalam jurnal dengan judul: “Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan”¹⁵ Persamaan dengan tesis yang akan disusun peneliti adalah sama-sama meneliti tentang kegiatan MGMP dalam hubungannya dengan kompetensi guru.

Sedangkan perbedaannya adalah pada jurnal ini menjelaskan bahwa Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah wadah untuk pertemuan para guru mata pelajaran di sekolah. Organisasi tersebut dibentuk sebagai forum pertemuan para guru mata pelajaran, selain itu juga sebagai sarana silaturahmi serta sebagai organisasi yang menampung berbagai gagasan para guru dan juga sebagai sarana menampung berbagai permasalahan yang dihadapi guru di sekolah masing-masing. ini membuktikan bahwa begitu pentingnya pembentukan MGMP di dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh guru di satuan pendidikan masing-masing. Dengan melalui MGMP diharapkan guru dapat mempertahankan kualitas kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai guru sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam dunia kerja. Peran serta MGMP dalam proses peningkatan kinerja guru, dituntut untuk melakukan berbagai terobosan-terobosan yang akan membangun pendidikan berkualitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali beberapa teori tentang MGMP, dan peranannya dalam meningkatkan kinerja guru PAI SMA kota Balikpapan, terkandung

¹⁵Firman, “Peranan MGMP Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA di Kota Balikpapan” (Jurnal: Jurnal Sains Terapan No. 1 Vol. 2 Juni Issn 2406 – 8810, 2016)

maksud menjadikan pedoman dalam proses mengajar sehingga mampu menghasilkan guru-guru yang memiliki kinerja baik.

Sedangkan pada tesis yang akan penulis teliti yaitu tentang kegiatan MGMP PAI SMP Rayon 1 Pandeglang dan peranannya dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di Rayon 1 Pandeglang.

Adapun penelitian ini diberi judul "*Peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru PAI SMP di Rayon 01 Kabupaten Pandeglang*" (*Study Kasus di MGMP PAI SMP Rayon 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang*)

Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian dalam penelitian ini difokuskan pada peran MGMP secara kelembagaan terhadap peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI SMP di rayon 01 kabupaten pandeglang. Sehingga diharapkan adanya peningkatan dalam proses dan mutu pembelajaran, yang akan berimplikasi terhadap peningkatan prestasi dan hasil belajar siswa.

G. Kerangka Pemikiran

Kata '*Pedagogik*' tidak akan asing di telinga guru, tetapi apakah semua guru memahami apa yang dimaksud dengan Kompetensi Pedagogik walau sebenarnya sudah pernah di lakukannya. Kompetensi Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogik menjadi salah satu jenis kompetensi yang harus dikuasai guru.

Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya. Penguasaan Kompetensi Pedagogik disertai dengan profesional akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik.

Kompetensi Pedagogik diperoleh melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama

dalam jabatan, yang didukung oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.¹⁶

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan.¹⁷

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas.

Problem rendahnya mutu dan profesionalitas guru di Indonesia sudah dirasakan sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya guru yang belum memenuhi kualifikasi sebagai guru profesional. Fenomena yang seperti inilah yang mengakibatkan mutu pendidikan di Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan kualitas pendidikan di negara maju, atau bahkan masih lebih rendah dari pada pendidikan di negara-negara di wilayah Asia lainnya.¹⁸

Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya yang tidak berkualitas dalam menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas.

¹⁶ Y. Suryana, *Kompetensi Pedagogik, Untuk Meningkatkan, ...* hlm . 3

¹⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 5

¹⁸ Sulistiyo, *Seminar Sertifikasi Guru Antara Profesionalisme dan Komersialisme*, (Semarang: Seminar Regional Fakultas tarbiyah IAIN Walisongo, 2007).

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional menunjukkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip, diantaranya; (1) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas, (2) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, dan (3) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹⁹

Secara etimologi arti profesi berasal dari bahasa Inggris profession yang artinya keterangan, pernyataan, kepercayaan agama, pencaharian dan dalam bahasa Latin disebut profecus yang artinya: mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan pekerjaan tertentu,²⁰ yang mana pengakuannya itu berasal dari siswa, kolega, kepala sekolah, pengawas, dan masyarakat pada umumnya.

Adapun secara terminologi, profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrument untuk melakukan perbuatan praktis.²¹ Seorang guru yang profesional harus memiliki sifat dan sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meski mereka mengerjakan suatu pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Tidak jarang pula orang yang berlatar belakang pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja yang profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada mereka.²²

Keprofesionalan seorang guru adalah dengan cara mengembangkan profesi keguruannya, yang bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), h. 4.

²⁰Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru Dari Pra-Jabatan, Induksi, ke Profesional Madani*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 101

²¹Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru ...*h. 103

²²Sudarwan Danim, *Pengembangan Profesi Guru ...*hal 105

memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan dalam proses pendidikan dan lebih bertanggung jawab terhadap proses pendidikan tersebut, seperti mengabdikan dirinya pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, Negara dan agama, sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Di samping itu pula setiap guru harus dapat memahami fungsi, peran dan tanggung jawab terhadap cara bertindak dan menunaikan pekerjaannya di masyarakat.²³

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28, bahwa seorang pendidik atau guru memiliki; (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) Kualifikasi akademik yang dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau dengan sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:(a) Kompetensi pedagogik, (b) Kompetensi kepribadian (c) Kompetensi profesional (d) Kompetensi sosial.²⁴

Pada kompetensi pedagogik meliputi; pemahaman terhadap kurikulum seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 dengan berbagai permasalahannya, penyusunan bahan ajar dan Lembar Kerja Siswa (LKS), pemahaman model-model pembelajaran dan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, teknik evaluasi, permasalahan peserta didik, serta perihal kepustakaan. Kompetensi kepribadian meliputi; sehat jasmani dan rohani, bertakwa, memiliki

²³ Ahmad Suriansyah, *Landasan Pendidikan*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), h. 76.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), h.14-15

kecerdasan spiritual dan intelektual, berwibawa, ikhlas, sabar, tidak suka marah, mampu member motivasi dan menegur dengan bijaksana.²⁵

Kompetensi social adalah berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial, maka harus dapat memperlakukan peserta didik secara wajar dan bertujuan agar tercapai optimalisasi potensi pada diri masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistic yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik tersebut. Kompetensi social yang dimiliki seorang guru adalah lebih banyak menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti: orang tua, tetangga dan sesama teman.²⁶

Kompetensi Profesional adalah salah satu unsur yang harus dimiliki oleh guru yaitu dengan cara menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam, maka oleh sebab itu peran guru sebagai pengelola proses pembelajaran harus memiliki kemampuan; (a) Merencanakan system pembelajaran seperti: merumuskan tujuan, memilih materi yang akan diajarkan, menggunakan metode, menggunakan sumber belajar yang ada, dan menggunakan media pembelajaran, (b) Melaksanakan system pembelajaran, seperti: memilih bentuk pembelajaran yang tepat, menyajikan urutan pembelajaran yang tepat, (c) Mengembangkan system pembelajaran, seperti: mengoptimalkan potensi peserta didik, meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri, mengembangkan program pembelajaran lebih lanjut.²⁷

Dari pengertian profesi guru tersebut di atas dan penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan dan keahlian khusus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Hubungan antara profesi dan kompetensi dijelaskan oleh Muhibbin Syah (1995) dengan

²⁵Imam Tholkhah, *Profil Ideal Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Titian Pena, 2008), h. 36.

²⁶Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 19.

²⁷Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan Problema, ... h. 20*

mengatakan pengertian dasar kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Kompetensi guru yang dikaitkan dengan keprofesionalan guru adalah seorang guru yang kompeten (berkemampuan). Karena itu kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi.²⁸

Dalam rangka meningkatkan penguasaan kompetensi guru seperti tersebut di atas, terlebih bagi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) adalah dengan cara; (1) Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam, (2) Menganalisa materi struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.²⁹

Di dalam Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama (MGMP PAI SMP) ditegaskan bahwa; untuk menunjang peningkatan kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut diperlukana adanya wadah (forum organisasi) yang berfungsi sebagai wahana komunikasi, informasi, diskusi, dan pembinaan sesama guru pendidikan agama Islam pada SMP perlu ditingkatkan fungsinya secara optimal.³⁰

Keberadaan organisasi profesi guru atau forum Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama (KKG-PAI) untuk jenjang Sekolah Dasar, dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP-PAI) untuk jenjang SMP dan SMA/SMK ini perlu diaktualisasikan dan diberdayakan sesuai perkembangan pendidikan saat ini, di samping itu pula sebagai pembinaan dan pengembangan berbagai kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI) tersebut secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.

²⁸ Sudarwan Danim, *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 56

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru, (Jakarta: 2007), h. 23.

³⁰ Departemen Agama RI, Dirjen Pendidikan Islams, Direktur PAIS, *Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP*, (Jakarta: Depag RI, 2008), h. 2

Dengan demikian maka guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu berperan secara optimal dalam menampilkan nilai-nilai keIslaman yang lebih dinamis dan aplikatif. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus memiliki skill dan kompetensi yang handal sehingga diharapkan dapat bersaing secara positif bagi kemajuan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah salah satu wadah atau tempat kegiatan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan untuk membina hubungan kerjasama secara baik antara sesama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing guru. Maka melalui kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesionalismenya, apalagi kalau guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tersebut telah bersertifikasi, maka tanpa peningkatan kemampuan dan pengembangan tugas dan fungsi sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI), rasanya sulit menciptakan situasi yang kondusif untuk menumbuh kembangkan suasana di sekolah yang berdampak pada pencapaian kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Islam merupakan tugas Direktorat Pendidikan Agama Islam pada sekolah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 248 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Tugas Pembinaan dan Pelayanan di Bidang Pendidikan Agama Islam merupakan penjabaran pasal 3 dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu: bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, bermutu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Peningkatan mutu pendidikan agama Islam pada sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya peningkatan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, tersedianya sarana prasarana ibadah yang memadai, intensitas supervise akademik, dan pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai wadah pengembangan profesi terhadap guru secara berkelanjutan. Dalam hal ini peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMP) sangat diharapkan dapat mensukseskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.³¹

Guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum sebagaimana guru mata pelajaran lainnya dituntut untuk memiliki kemampuan profesional yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yaitu bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan social. Pengembangan keempat kompetensi tersebut perlu terus dilakukan baik melalui pendidikan dan pelatihan atau diskusi dan kerja kelompok atau wadah organisasi guru dalam hal ini MGMP.³²

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tesis ini, maka penulis membagi isi tesis ini dengan beberapa bagian, diantaranya: Pada bagian awal ini mencakup Halaman Cover, Halaman Pernyataan, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, dan Daftar Isi. Pada bagian isi meliputi:

³¹Direktorat PAI Pada Sekolah, Dirjen Pendis Depag RI, *Pedoman Musyawarah Guru Mata Pelajaran Agama Islam SMP*, (Jakarta: 2008), h. iii

³²Direktorat PAI, *Pedoman Musyawarah Guru ...* h. iv

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, Sistematika Pembahasan.

BAB II KOMPETENSI PEDAGOGIK, KOMPETENSI PROFESIONAL DAN MGMP PAI SMP, Bab ini menguraikan secara rinci tentang Kompetensi Pedagogik, Pengertian Kompetensi, Pengertian Kompetensi Pedagogik, Indikator Kompetensi Pedagogik Guru, Profesionalisme guru, Tinjauan tentang Profesionalisme guru, Pengertian profesionalisme guru, Ciri-ciri guru yang profesional, Kemampuan Yang Harus Dimiliki Guru Profesional, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru, Pengembangan Sikap Profesionalisme Guru, Profesionalisme Guru dalam Perspektif Islam, Tugas Guru PAI, Pengertian guru PAI, Peran guru PAI, Tugas dan tanggung jawab guru PAI, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Pengertian Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Fungsi KKG/MGMP, Tujuan KKG/MGMP, Ruang Lingkup Organisasi Profesi, Bentuk dan Corak Organisasi Profesi Kependidikan, Struktur dan Kedudukan Organisasi Profesi Keguruan, Keanggotaan Organisasi Profesi Keguruan, Program Operasional Organisasi Profesi Keguruan, Peranan Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Pendidikan, Peran Organisasi Profesi (KKG/MGMP) dalam Merumuskan Pembelajaran/Pengajaran di Sekolah, Sejarah Lahirnya Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI SMP, Latar belakang MGMP PAI, Fungsi dan Tujuan, Organisasi, Tugas Dan Tanggung Jawab, Struktur Organisasi, Bentuk Kegiatan, Pengaturan waktu dan tempat kegiatan, Pembiayaan. Tinjauan Akademis Tentang MGMP Sebagai Organisasi Profesi Guru.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, Pada bab ini menjelaskan tentang Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian, Setting Penelitian, Sumber Data, Teknik

Pengumpulan Data, Instrument Penelitian, Teknik Analisa Data, Tahapan Penelitian dan Uji Keabsahan Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini mencakup: Gambaran umum MGMP PAI SMP Rayon 1 Pandeglang, Sejarah MGMP PAI SMP Struktur Organisasi MGMP, Visi, Misi dan Tujuan MGMP, Program Kerja MGMP, Implementasi Program Kerja MGMP, Faktor Pendukung Keberhasilan Program MGMP, Hambatan-hambatan Implementasi Program Kerja dan solusinya. Hasil Penelitian terdiri dari: Kondisi Kompetensi Pedagogik dan profesional guru PAI SMP Rayon 1 Pandeglang, Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI SMP di Rayon 1 Pandeglang. Pembahasan terdiri dari: Analisis Kompetensi Pedagogik dan profesional guru PAI SMP PAI Rayon 1 Pandeglang, Analisis Peran MGMP dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru PAI SMP di Rayon 1 Pandeglang, Kendala dalam peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional guru PAI di MGMP PAI Rayon 1 Pandeglang dan solusinya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, Pada bab ini meliputi kesimpulan, dan saran. Bagian akhir mencakup Daftar pustaka, Lampiran-lampiran, dan Daftar Riwayat Pendidikan Penulis.